

Judul : Pemudik Dengan Kendaraan Pribadi Akan Diperiksa Acak
Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 12

Pemudik dengan Kendaraan Pribadi Akan Diperiksa Acak

JAKARTA – Pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi akan diperiksa secara acak status vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi. Langkah tersebut merupakan cara pemerintah untuk mengetahui kelayakan pelaku perjalanan di masa liburan mudik Lebaran.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, pemeriksaan acak yang dimaksud akan dilakukan disekeliling titik strategis sebagai upaya skrining pelaku perjalanan. "Pemeriksaan akan dilakukan pada data yang tertera berdasarkan riwayat tertular maupun vaksinasi di dalam PeduliLindungi yang menunjukkan status kelayakan untuk bepergian," ujar Wiku Wiku dalam konferensi pers secara virtual kemarin.

Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16/2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19. Beberapa ketentuan terkait perjalanan mudik antara lain mereka yang sudah menerima vaksin *booster* maka tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau tes antigen.

Adapun warga yang sudah mendapatkan vaksin dua kali tetap wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau, hasil ne-

gatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. "Penerima vaksin satu kali wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan," demikian bunyi aturan terkait perjalanan mudik yang dirilis akhir pekan lalu.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengungkapkan, negara memiliki tugas untuk melindungi keselamatan semua rakyat Indonesia selama pandemi Covid-19, antara lain dengan menggelar vaksinasi *booster*. Pemerintah juga perlu mendengarkan permintaan pentingnya penggunaan vaksin halal. "Negara ini punya tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Senin (4/4).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menekankan hal itu sesuai Komisi IX DPR menerima audiensi dari Pengurus Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Indonesia, Pengurus DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Pengurus Himpunan Tenaga Kesehatan Non ASN Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Edy menyatakan, keselamatan rakyat Indonesia merupakan hal utama yang ditekan-

kan pemerintah pada vaksinasi *booster*. Apalagi, terbukti dengan mengikuti vaksin *booster* risiko terkena Covid-19 itu sangat rendah. Artinya, semakin banyak rakyat yang sudah *booster*, semakin bagus untuk mereka. "Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin *booster* gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apa pun dong untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka di *booster*," kata Edy.

Edy menambahkan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah bahwa mereka yang akan mudik Lebaran 2022 harus mengikuti vaksin *booster*. Termasuk kebijakan terbaru untuk pemudik yang menggunakan pesawat terbang, jika belum *booster* maka harus menunjukkan hasil tes Covid-19.

Untuk penggunaan vaksin halal sebagaimana mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan pada Kamis 31 Maret 2022, Edy Wuryanto menegaskan bahwa permintaan umat Islam itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan, sepatutnya pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin halal. Namun, harus disesuaikan dengan jumlah atau kapasitas vaksin yang ada.

✉ bintimufarida@ricoasimanjuntak.com
sindonews.com